



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCA SARJANA**

TESIS

**ANALISIS PERAN CAMAT
DI BEKASI SELATAN (KOTA BEKASI)
DAN GAMBIR (JAKARTA PUSAT)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar
Magister Sains (M.Si.) dalam Ilmu Administrasi**

OLEH :

**NAMA : SRI HANDAYANI
NPM : 0606017731
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN : ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK**

**JAKARTA
Desember, 2008**

UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SCIENCE
POST GRADUATE PROGRAM
MAJORING ADMINISTRATIVE AND PUBLIC POLICY

ABSTRACT

Sri Handayani
0606017731

The Analysis of The Role of Sub District Officer of South Bekasi (Of Bekasi City) and Gambir (Of Central Jakarta)

x +133 pages + 11 attachment

Bibliography : 38 books (year 1968-year 2007) + 19 articles/papers + 12 regulations

Law Num. 32/2004 emphasizes that the main function of local government is to give service to public. Therefore, in order to enhance the quality of public service, the delegation of some of the authorities of district officer to the subdistrict officer. The one of sub district officer to the subordinate should be regarded as the effort to achieve effectivity and efficiency in performing government, and utilize as the means to improve the quality of public service in local area.

The officer of the subdistrict, one must have certain ability. Leading the sub district, the officer must have managerial capability such as empowering and making the best use of the existing human resources, to achieve the goals through activities. The other leadership capabilities are to rule, influence and direct to pull out the admittance, obedience and loyalty. Last but not least, one should be able to make necessary action to achieve the goals.

Given a new position in the bill, the officer of the district should become the leading rule in public service of district/municipality. If all the authorities are concentrated in district/municipality, they will be heavy work overload which eventually will influence the quality of public service. In reality, district/municipality, refers to delegate the authority to the head of institution, rather than to the sub district.

The research on The Role of Sub District Officer of South Bekasi (Of Bekasi City) and Gambir (of Central Jakarta) is conducted by using qualitative, descriptive analysis. The informen are the head of institution and entailed. The sample are the institution of Demography and Planology, by which most services are given to public.

The conclusion gathered from data analysis of interviews, secondary data and laws, as confirmed that if it possible to enhance and empower the role of sub district by emphasizing the delegation of authority from major to sub district so that it will enforce the institution to obey and adjust themselves to the situation.

The delegation of authority should also conclude the adequate funding and technology to support the performance of the tasks. Therefore the subdistrict employee will not be unwilling to do the duties.

The recommendation is given hoping to be the solution of the problem. It is the emphasize of the delegation of some of authorities from the major of South Bekasi to sub district and also the willingness of the institution entailed in giving the authority. The

delegation must also conclude funding and facility recovery at sub district that will support the public services. More over the quality of human resources should also improve to optimize the public service given.



ABSTRAK

Sri Handayani
0606017731

Analisis Peran Camat di Bekasi Selatan (Kota Bekasi) dan Gambir (Jakarta Pusat)

x +133 hal + 11 lampiran

Daftar Pustaka : 38 buku (tahun 1968 - 2007) + 19 artikel/paper + 12 peraturan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menekankan fungsi utama pemerintah daerah yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, dalam perspektif peningkatan kualitas pelayanan publik, pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/walikota kepada camat dan dari camat kepada level dibawahnya seharusnya dapat dijadikan sebagai upaya untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum di daerah.

Sebagai pemimpin di kecamatan, seorang camat harus mempunyai sejumlah kemampuan tertentu. Seorang pemimpin dalam melaksanakan manajemen pemerintahan harus memiliki kemampuan manajerial yaitu kemampuan untuk memanfaatkan dan menggerakkan sumber daya yang ada agar dapat digerakkan dan diarahkan bagi tercapainya tujuan melalui kegiatan orang lain serta mempunyai kemampuan leadership yaitu kemampuan untuk memimpin, mempengaruhi, mengarahkan agar timbul pengakuan, kepatuhan, ketaatan serta memiliki kemampuan dan kesadaran untuk melakukan suatu kegiatan (mengambil langkah-langkah) bagi tercapainya suatu tujuan.

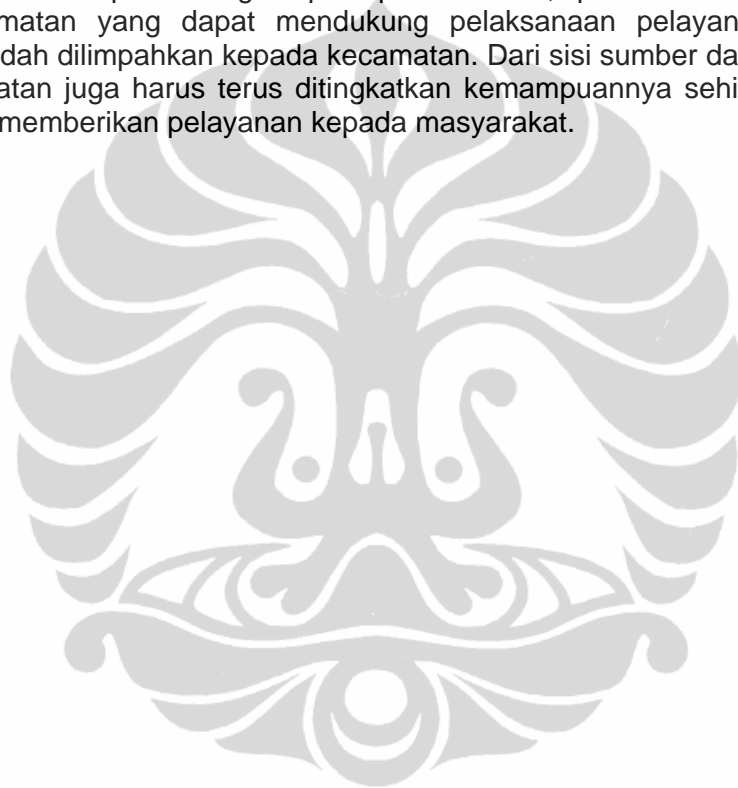
Dengan posisi barunya di perundang-undangan, seharusnya camat dapat menjadi ujung tombak kembar pelayanan publik di kabupaten./kota karena jika kewenangan terkonsentrasi di kabupaten/kota permasalahan umum yang timbul adalah pemerintah kabupaten/kota akan mengalami overload beban kerja, yang akan mempengaruhi pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Tetapi pada kenyataannya selama ini pemerintahan kabupaten/kota lebih menjadikan kepala dinas dan kepala badan sebagai ujung tombak pelayanan, dibandingkan melimpahkan kewenangan kepada kecamatan.

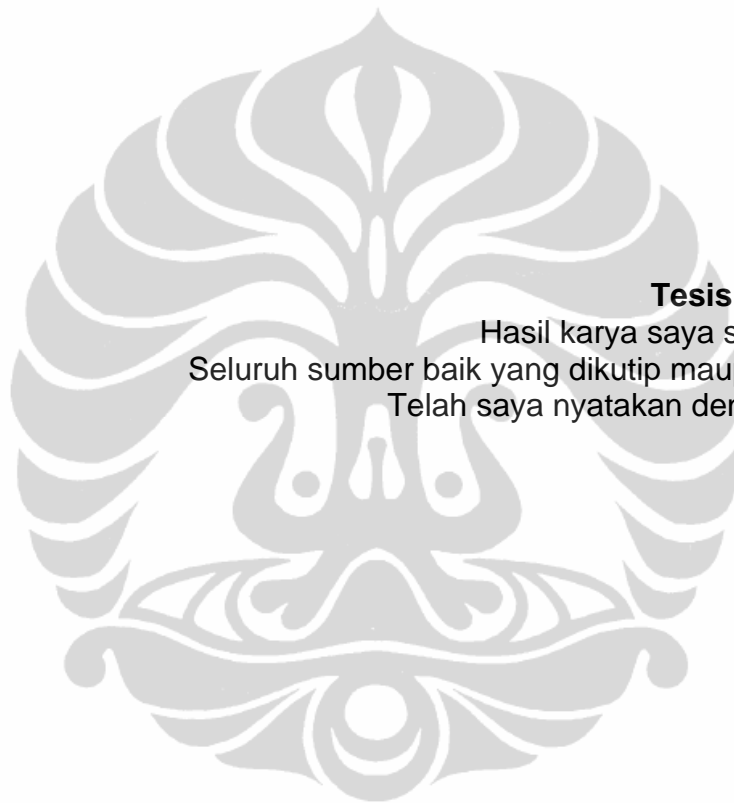
Penelitian tentang peran camat di Kecamatan Bekasi Selatan dan Gambir akan dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif, dengan narasumber camat, sekretaris daerah, kepala dinas terkait dan aparat dinas terkait. Sebagai sampel penelitian diambil Dinas kependudukan dan Dinas Tata Kota karena kedua dinas tersebut oleh peneliti dianggap sebagai dinas yang paling banyak berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan menggunakan analisa data yang bersumber pada hasil wawancara, data sekunder dan peraturan-peraturan pendukung, diperoleh simpulan bahwa masih dimungkinkan untuk melakukan penguatan peran kelembagaan di Bekasi Selatan yang

dilakukan dengan cara menegaskan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada camat sehingga dapat memaksa dinas untuk ketentuan tersebut dengan adanya sumber dana yang cukup bagi kecamatan untuk menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak muncul keengganan dari aparat kecamatan dalam menjalankan pelimpahan kewenangan. Disamping itu adanya dukungan peralatan dan teknologi yang memadai bagi kecamatan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan.

Saran yang diberikan yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan diatas adalah diperlukan adanya ketegasan dari walikota Bekasi untuk memberikan sebagian kewenangan dari dinas kepada kecamatan, adanya kelegowoan dari dinsa terkait dalam memberikan sebagian kewenangan yang dimilikinya, pelimpahan sebagian wewenang harus disertai pula dengan pelimpahan dana, perbaikan sarana dan prasarana di kecamatan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang sudah dilimpahkan kepada kecamatan. Dari sisi sumber daya manusia yang ada di kecamatan juga harus terus ditingkatkan kemampuannya sehingga dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.





Tesis ini adalah
Hasil karya saya sendiri, dan
Seluruh sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar

Sri Handayani



untuk yang tersayang dan selalu setia menemani,
Indah Setyawati

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkah dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini, yang merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa Program Pasca sarjana Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Penulis mengangkat permasalahan hubungan antara camat dengan dinas teknis terkait di Kecamatan Bekasi Selatan dan Gambir serta sejauh mana peran camat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dari dinas terkait di Kecamatan Bekasi Selatan dan Gambir di era otonomi daerah saat ini. Penelitian ini penulis harapkan akan bermanfaat bagi peningkatan peran camat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dari dinas terkait di wilayah Kota Bekasi dan Jakarta Pusat serta menjajaki kemungkinan dilakukannya penguatan peran kecamatan di Kota Bekasi.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga penulis perlu menghaturkan terima kasih serta penghargaan kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang tidak pernah putus memberikan doa restu dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan segala permasalahan yang penulis hadapi.
2. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan jajaran pejabat di Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di jenjang magister ini.
3. Bapak Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si yang telah dengan telaten membimbing penulis selama masa penulisan tesis ini.
4. Bapak Camat Bekasi Selatan dan Gambir beserta jajarannya, Kepala Dinas Kependudukan Kota Bekasi dan DKI Jakarta beserta jajarannya, Kepala Dinas Tata Kota di Kota Bekasi dan Dki Jakarta beserta jajarannya yang dengan terbuka mengijinkan penulis melakukan wawancara dan mengambil data-data guna penyelesaian tesis.
5. Prof. Bhenyamin Hoessein beserta staf di Sekretariat Program Studi Ilmu Administrasi yang telah banyak membantu saya selama dua tahun masa studi saya di Magister Ilmu Administrasi.

6. Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H yang senantiasa memberikan dukungan dan memberikan ijin kepada penulis untuk meninggalkan pekerjaan di saat penulis harus menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Mas Ari, Mbak Fitri, Evi, Nursyam, Dodi dan Yuni yang senantiasa mendorong penulis untuk tidak berputus asa.
8. Mbak Tya yang tidak pernah lelah mengingatkan mamanya untuk menyelesaikan tesisnya. Indah adalah sumber kekuatan bagi penulis dalam menjalani kehidupan ini.
9. Mbak Silvi, Tiur, Johan, Mardian, Niken, Yohana dan teman-teman lain di angkatan XIV yang telah bersedia menjadi teman diskusi dan berkeluh kesah serta penyemangat disaat penulis mulai kehabisan energi untuk menyelesaikan tesis ini.
10. Teman, rekan kerja dan pihak lain yang belum tersebut di atas, untuk dukungan yang diberikan kepada penulis dengan berbagai bentuk.

Tulisan ini tentunya masih sangat jauh dari kesempurnaan. Karenanya penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran untuk sempurnanya tulisan ini di masa yang akan datang.

Jakarta, 23 Desember 2008

Penulis

Sri Handayani

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstract	ii
Abstrak	iv
Lembar Orisinalitas	vi
Lembar Persetujuan	vii
Lembar Pengesahan	viii
Halaman Persembahan	ix
Kata Pengantar.....	x
Daftar Isi	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Signifikansi Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II : TINJAUAN LITERATUR DAN METODOLOGI PENELITIAN	
I. PENELITIAN TERDAHULU.....	11
II. TINJAUAN LITERATUR.....	
A. Desentralisasi.....	20
B. Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah	25
C. Teori Kelembagaan.....	28
D. Teori Pendelegasian Wewenang.....	29
E. Pendelegasian Wewenang Kepada Kecamatan.....	33
F. Teori Pelayanan.....	34
G. Teori Kepemimpinan.....	38
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	40
B. Jenis Penelitian.....	41
C. Teknik Pengumpulan Data.....	41
D. Narasumber.....	42
E. Teknik Analisa Data.....	42
BAB III : GAMBARAN UMUM KELEMBAGAAN KECAMATAN DAN DINAS TEKNIS TERKAIT	
A. Sejarah Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah.....	45
B. Kelembagaan Kecamatan	52
C. Kecamatan dan Dinas Teknis.....	56
D. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	
D.1. Kota Bekasi.....	57
D.2. Kelembagaan Kecamatan Di Kota Bekasi.....	59
D.3. Administrasi Kependudukan Di Kota Bekasi.....	62
D.4. Penataan Ruang dan Pemukiman Kota Bekasi	62

E. Kota Administrasi Jakarta Pusat.....	65
E.1. Kecamatan Gambir.....	67
E.2. Kelembagaan Kecamatan Di DKI Jakarta.....	73
E.3. Administrasi Kependudukan Di DKI Jakarta.....	76
G.4. Penataan Kota dan Pengawasan Bangunan DKI Jakarta.....	76
 BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN	
A. Kewenangan Camat	
A.1. Kota Bekasi.....	80
A.2. Jakarta Pusat.....	93
 B. Hubungan Antara Camat Dengan Perangkat Daerah Lain	
B.1. Bekasi Selatan.....	
1. Hubungan Dengan Dinas Kependudukan Kota Bekasi..	98
2. Hubungan Dengan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Bekasi.....	103
B.2. Gambir	
1. Hubungan Dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta.....	108
2. Hubungan Dengan Dinas Tata Kota DKI Jakarta.....	112
 C. Peran Camat Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
C.1. Di Bekasi Selatan.....	116
C.2. Di Gambir	121
 BAB V : SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan.....	127
B. Saran.....	127
 DAFTAR PUSTAKA.....	
	129